

IMPLEMENTASI SPIRITUALITAS PANCASILA MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK MEMBENTUK KARAKTER ANTI KORUPSI

Subelo Wiyono
Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia
subelo.wiyono@unpas.ac.id

ABSTRAK

Corruption is considered an extraordinary crime, yet it hasn't been treated as one. Higher education institutes hold a strategic role in supporting the inhibition of corruption acts. Rationality and scientific culture in universities hopefully are able to accelerate the movement in hindering corruption. The perspective of philosophy in Civic Education needed to be advanced in order to provide students the ample mindset to face real life quandaries. Pancasila as the core of Indonesian Civic Education had to be delved deep in and used systematically as the central theme in classes. This thesis is humbly wished to have a contribution in helping KPK to thwart corruption crimes, materially or formally. Impeding corruption needs not only related actions, but also governmental efforts to guard the process and constitute anticorruption regulations. Assuredly proceeding anticorruption education would not only result in averted corruption acts, but also offer the next generation a much-needed protection against corruption viruses, no matter how strong. Colleges and universities become the integral part in the grand design of the corruption prevention program. Upgrading class materials, improving quality of the professors, and their spiritual passion to communicate with their students are aspects which needed to be evaluated periodically.

keywords: anticorruption education, Pancasila spirituality.

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi sebagai *extra ordinary crime* masih belum mendapat perlakuan sebagai *extra ordinary crime*. Perguruan tinggi memiliki peran strategis mendukung pencegahan tindak pidana korupsi. Rasionalitas dan budaya ilmiah perguruan tinggi diharapkan mampu menghasilkan percepatan gerakan pencegahan korupsi. Perspektif filsafat dalam Pendidikan Kewarganegaraan masih perlu ditumbuhkembangkan untuk membekali mahasiswa pola pikir yang memadai pada saat harus menghadapi lapangan riil kehidupan. Pancasila sebagai inti Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia perlu secara mendalam digali dan secara sistematis dijadikan tema sentral setiap perkuliahan. Tulisan ini diharapkan membantu Komisi Pemberantasan Korupsi secara materiil maupun formil untuk mencegah tindak pidana korupsi. Pencegahan tindak pidana korupsi tidak hanya membutuhkan satu

gerakan, tetapi juga dorongan kepada penguasa untuk secara terus-menerus mengawal dan menghasilkan kebijakan yang anti korupsi. Pendidikan anti korupsi dipastikan berjalan tidak hanya mencegah terjadinya korupsi akan tetapi juga memberikan mantel kekebalan bagi generasi yang akan datang untuk tidak tertembus virus-virus korupsi seberapa pun tajam dan kuatnya. Perguruan tinggi menjadi bagian penting *grand design* pencegahan tindak pidana korupsi. Pemutakhiran bahan-bahan perkuliahan, peningkatan kompetensi dosen, semangat spiritual dosen pada saat berkomunikasi kepada mahasiswa menjadi kajian yang secara berkala perlu evaluasi.

Kata kunci: pendidikan anti korupsi, spiritualitas Pancasila

PENDAHULUAN

Spiritualitas Pancasila menjadi bagian penting dalam pendidikan anti korupsi karena di dalamnya terletak jatidiri bangsa Indonesia. Hal demikian manjadi tidak bisa ditawar-tawar lagi manakala perspektif kita arahkan kepada kasus-kasus korupsi yang semakin hari semakin terkuak dan menjadi hantu bagi dunia pendidikan di Indonesia. Tokoh-tokoh yang tertangkap dan mendapatkan vonis berkekuatan hukum tetap bukanlah figur yang sepiantas mencerminkan pribadi-pribadi yang tidak bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kasus-kasus korupsi dalam pengadaan Al Quran, proyek haji, dana abadi umat adalah deretan kasus-kasus yang melibatkan oknum-oknum yang sebelum kasus-kasus tersebut dianggap memiliki kepribadian mulia.

Kasus-kasus korupsi yang terjadi di dalam lingkungan pendidikan tentu juga menjadi perhatian serius bagi kita. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahkan mensinyalir kasus korupsi terbanyak terjadi di sektor pendidikan. Masa depan bangsa sangat dipertaruhkan dengan adanya situasai seperti ini di dunia pendidikan (Feriyansyah, 2013). Generasi penerus yang diharapkan menjadi kekuatan tangguh di masa depan digerogoti oleh oknum-oknum yang mengabaikan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oknum-oknum yang melakukan berbagai penyimpangan tersebut membuat situasi semakin buruk pada

saat mereka memanfaatkan simbol-simbol spiritual untuk menutupi kejahatan yang dilakukan.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 mengamanatkan kepada pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Perguruan tinggi dalam menyelenggarakan mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan dituntut dapat optimal mengimplementasikan satu sistem pembelajaran yang dijiwai oleh spirit amanat undang-undang tersebut. Keberhasilan penyelenggaraan pembelajaran diperlihatkan antara lain dengan keluaran pribadi-pribadi yang hidup di tengah-tengah masyarakat berkarakter anti korupsi.

Perguruan tinggi wajib menyadari bahwa Ilmu Kewarganegaraan tidak bebas nilai akan tetapi tumbuh dan berkembang berdasarkan nilai untuk memberikan manfaat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa (Muchtar, 2017a). Ilmu Kewarganegaraan secara aksiologis sebagai sarana dalam memecahkan berbagai masalah kebangsaan dan kenegaraan sehingga tujuan bernegara dapat tercapai. Pendidikan anti korupsi sebagai langkah penting mencegah tindak pidana korupsi membutuhkan pemahaman secara mendalam atas filosofis Pancasila.

Pemahaman filosofis nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari menjadi salah satu sarana untuk membangun kesadaran spiritual yang diharapkan sanggup menahan gempuran sikap korupsi yang ada di dalam lingkungan dimanapun anak bangsa bertugas. Perguruan tinggi dapat berperan aktif ikut menyusun *grand design* pencegahan tindak pidana korupsi. Penyajian mata kuliah Kewarganegaraan dan Pancasila memiliki peran strategis dalam membentuk karakter mahasiswa agar di dalam dirinya terbangun kesadaran kokoh untuk ikut serta mencegah tindak pidana korupsi.

1. Spritualitas Pancasila

Sejak zaman batu hingga pengaruh kebudayaan perunggu, masyarakat Indonesia yang saat itu belum bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengembangkan sistem kepercayaan sendiri, yang secara umum bisa dikategorikan bercorak animisme dan dinamisme. Selain percaya adanya ruh, animisme juga memiliki kepercayaan bahwa orang mati jiwanya bisa masuk ke dalam hewan. Kepercayaan animisme di Nusantara kebanyakan juga meyakini bahwa segala sesuatu mempunyai tenaga atau kekuatan yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan usaha manusia dalam mempertahankan hidupnya (Latif, 2014). Nilai-nilai spiritual yang berkembang mewarnai sejarah Indonesia itu berinteraksi dengan budaya lain yang berkembang di berbagai belahan bumi. Bahkan ciri spiritual yang beragam di Indonesia tidak didasarkan pada suku bangsa, akan tetapi secara alami terwujud dalam perjalanan sejarah. Keimanan bangsa Indonesia dalam agama Islam, Kristen, Khatolik, Hindu, Budha dan Konghucu mewarnai perjalanan sejarah membentuk kepribadian bangsa. Sila pertama Pancasila yang menjiwai dan meliputi keempat sila berikutnya adalah kristalisasi nilai-nilai Ketuhanan yang sudah lama tertanam dalam diri bangsa Indonesia.

Tulisan ini bermaksud menegaskan bahwa di dalam sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia terdapat nilai-nilai spiritual karena sila pertama meliputi dan menjiwai sila-sila berikutnya. Sehingga sifat-sifat Tuhan Yang Maha Kuasa, Maha Mengetahui, Maha Adil, dan lain-lain ada dalam kesadaran diri bangsa Indonesia pada saat mengimplementasikan kelima sila dalam kehidupan sehari-hari dalam pergaulan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kesadaran yang dibangun dalam setiap pribadi anak bangsa akan menjadi jatidiri bangsa bernafaskan ketuhanan. Sehingga perlu ditanya kembali mantan ketua Mahkamah Konstitusi, mantan gubernur, mantan walikota, dan banyak mantan pejabat yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan karena kasus korupsi, kemana Tuhan pada saat mereka melakukan korupsi ? Apakah kesadaran spiritual itu hilang di dalam benak mereka,

atau kesalahan menafsirkan atas satu pasal atau satu aturan sehingga tidak sengaja melakukan korupsi ?

Pancasila adalah kristalisasi nilai-nilai luhur yang sudah disepakati para pendiri bangsa. Pancasila dengan sila-silanya yang mengandung nilai-nilai luhur serta universal adalah dasar yang ideal karena mampu menampung segala macam aspirasi nilai yang ada di Indonesia. Penduduk Indonesia yang memiliki jumlah muslim terbesar di dunia memiliki toleransi yang demikian besar sehingga Indonesia tidak menjadi negara Islam. Pancasila sebagai dasar negara sudah cukup mengakomodir semua kepentingan umat masing-masing agama yang ada di Indonesia. Spirit Ketuhanan yang menjadi dasar utama dan paling tinggi yang terletak pada sila pertama hingga sampai pada tujuan bernegara yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pada sila terakhir (Muchtar, 2017, hlm. 76).

Pengampu mata kuliah Pancasila sudah selayaknya menjadi model spiritual bagaimana mengimplementasikan filosofi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dosen yang bisa menjadi model akan membuat mahasiswa mengalami proses internalisasi yang mendalam sebagai bekal pada saat nanti harus terjun ke lapangan sesuai dengan profesi dan keahlian masing-masing. Pembelajaran mata kuliah Kewarganegaraan dan Pancasila di kelas perlu waktu yang dialokasikan untuk diskusi bagaimana memahami dan menerapkan konsep-konsep spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Dosen muslim bisa membahas dalam topik-topik yang relevan bagaimana pemahaman dan implementasi syahadat, shalat, puasa, zakat, dan haji sebagai bekal mahasiswa sehingga mampu menyerap dinamika yang terjadi dalam masyarakat nyata.

Syahadat bagi seorang muslim merupakan ikrar yang setiap hari dibaca di dalam shalat. Ikrar tersebut mustinya bisa membentengi diri seorang muslim untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Mahasiswa diajak melihat ke depan bagaimana jika dia menjadi seorang pejabat dan senantiasa menyadari ikrar yang setiap hari dia getarkan melalui bibirnya. Ikrar yang keluar dari lubuk hati terdalam akan membuat semua tindakan pejabat menjadi ibadah sehingga terwujud pengabdian tidak hanya kepada masyarakat, bangsa, dan negara, akan tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Shalat yang dilaksanakan minimal sehari 5 (lima) kali akan membangun kepribadian mahasiswa menjadi manusia yang memiliki kesadaran spiritual tinggi. Kesadaran spiritual tersebut akan membuat setiap gerakan tangannya hanya menyentuh apa yang diperintahkan Tuhan dan menghindari setiap larangan yang dia ketahui dari ajaran agamanya. Shalat yang khusyu sanggup membentengi mahasiswa hingga nanti saat terjun di lapangan nyata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tidak akan terpengaruh oleh bisikan-bisikan negatif yang bertentangan dengan akhlak mulia.

Puasa membentuk kepribadian yang tangguh sanggup mengendalikan diri menahan hawa nafsu. Dosen pada kesempatan diskusi dengan mahasiswa bisa memberikan contoh bagaimana puasa sanggup membangun kepribadian anti korupsi. Mahasiswa yang memahami dan melatih diri dengan puasa akan mempersiapkan dirinya menjadi pribadi yang tangguh di masa-masa akan datang.

Zakat dan haji sebagai bagian dari ajaran Islam bisa didiskusikan pada topik-topik yang relevan dalam mata kuliah Kewarganegaraan maupun Pancasila sehingga mahasiswa mengetahui bagaimana spiritualitas Pancasila dan menghujamkan ideologi Pancasila di dalam kepribadiannya.

2. Filsafat Pancasila untuk Pendidikan Anti Korupsi

Pendidikan anti korupsi membutuhkan filsafat Pancasila untuk mengimbangi beratnya kasus-kasus korupsi yang melanda bangsa Indonesia saat ini. Menguatnya praktek kolusi, korupsi, nepotisme, primordialisme, disorientasi nilai politik dan bentuk lain yang bertentangan dengan paham konstitusi akan tumbuh seiring dengan melemahnya praktek demokrasi dalam sistem politik Indonesia (Muchtar, 2017b). Pancasila adalah falsafah, yang digali dari nilai-nilai luhur masyarakat. Pada saat unsur-unsur masyarakat memutuskan membentuk diri sebagai bangsa, maka nilai-nilai luhur masyarakat itu diangkat dan diabstraksikan menjadi pandangan hidup bangsa. Setelah bangsa Indonesia bersepakat membentuk negara, maka falsafah tersebut diangkat dan diabstraksikan lagi menjadi pandangan hidup negara. Nilai-nilai yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa, dan pandangan hidup negara, kemudian mengalami sistematisasi, sehingga dapat disebut sebagai ideologi bangsa dan ideologi negara (Wiyono, 2015).

Ideologi negara yang juga ideologi bangsa saat ini perlu diangkat tinggi-tinggi untuk menjadi perhatian bahwa dengan nilai-nilai Pancasila sebagai menjadi kepribadian bangsa maka individu-individu dengan kepribadian tersebut tidak mungkin melaksanakan korupsi. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya juga merupakan suatu sistem pengetahuan. Pengetahuan tersebut merupakan pedoman dasar bagi bangsa Indonesia dalam memandang realitas semesta, manusia, masyarakat, bangsa dan negara tentang makna hidup serta sebagai dasar bagi manusia dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam hidup dan kehidupan (Kaelan, 2010). Individu yang menjadikan Pancasila sebagai pedoman dasar dalam memandang realitas semesta, manusia, masyarakat, bangsa dan negara adalah individu-individu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pengampu mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan perlu membuka kitab-kitab yang dibaca oleh sebagian besar ulama karena mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Berbagai kitab yang ada menunjukkan bahwa banyak ulama yang menghargai pemikiran filsafat seperti Ibnu Rusyd dengan pernyataannya yang terkenal “Filsafat adalah saudara kandung syariat” (Noor, 2009, hlm. 407). Pengalaman penulis dalam mengampu mata kuliah Pancasila maupun Kewarganegaraan sering mendapat pertanyaan dari mahasiswa terkait pengajian maupun khutbah yang mereka dengarkan ada pernyataan bahwa filsafat adalah haram. Maka penjelasan yang terkait dengan keyakinan yang ada di dalam diri mahasiswa seperti ini perlu diberikan secara hati-hati dan mempertimbangkan kondisi psikologis mahasiswa yang bersangkutan. Apa yang disampaikan dosen diharapkan dapat menyehatkan pola pikir mahasiswa untuk bisa tetap kritis dan mampu bersikap arif di tengah-tengah keragaman masyarakat dimana mahasiswa tersebut berada.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mencantumkan betapa bangsa Indonesia dengan rendah hati dan penuh syukur mengakui kemerdekaan Indonesia bisa dicapai atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Pengakuan tersebut mencerminkan sikap religius para pendiri negara dalam berbagai dialog yang melalui kesulitan, kemelaratan dan penderitaan merasakan betul makna kehadiran,

perlindungan, dan kasih sayang Tuhan (Latif, 2014). Kuatnya jiwa spiritual dalam diri bangsa Indonesia membuat arus pendiri bangsa tidak bisa membayangkan ruang publik hampa Tuhan. Sejak tahun 1920-an, ketika Indonesia mulai dibayangkan sebagai komunitas politik bersama, mengatasi komunitas kultural dari ragam etnis dan agama, ide kebangsaan tidak terlepas dari spiritualitas (Latif, 2012). Hal demikian perlu dirawat oleh pengampu mata kuliah Pancasila maupun Kewarganegaraan agar mendasari pola pikir mahasiswa sebagai bekal saat menjadi pemimpin masa depan. Karena kebesaran Indonesia akan terwujud dengan lahirnya pemimpin-pemimpin yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

3. Pendidikan Anti Korupsi dalam Mata Kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan

Mata kuliah Pendidikan Pancasila memiliki tugas berat sebagai mata kuliah paling disorot manakala kasus-kasus korupsi semakin meningkat menimpa para pejabat yang sudah mendapatkan mata kuliah tersebut. Karakter bangsa menentukan kualitas bangsa dalam menyelesaikan masalah kebangsaannya. Kehidupan yang cerdas dapat diwujudkan apabila adanya sarana yang efektif untuk mewujudkannya. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai dan moral Pancasila perlu melakukan revitalisasi untuk kepentingan pembentukan warganegara yang berakhlak mulia, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Mughtar, 2017b). Pendidikan Pancasila untuk masa depan hendaknya bukan hanya pendidikan tentang Pancasila, tetapi juga pendidikan melalui Pancasila dan pendidikan untuk Pancasila (Winarno, 2016).

Pancasila berisi dan mengandung nilai-nilai yang dijabarkan dalam norma-norma hukum berupa pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai Pancasila pada dasarnya adalah nilai-nilai luhur budaya bangsa (Winarno, 2016). Nilai-nilai luhur budaya bangsa adalah bagaimana bangsa Indonesia memahami dan menafsirkan berbagai kitab suci dari agama-agama yang dipeluk oleh masing-masing umat beragama di Indonesia. Mata kuliah Pancasila memiliki peran strategis dalam membentuk karakter mahasiswa menjadi penganut agama yang baik yang memahami kitab sucinya dan sadar bahwa Pancasila dikristalkan oleh tokoh-tokoh pendiri negara yang beriman dan bertakwa dengan memahami kitab-kitab suci yang

sudah lama dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari oleh bangsa Indonesia sebelum proklamasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan Pendidikan Kewarganegaraan baik dalam epistemologi keilmuannya maupun dalam praktek pembelajarannya yang masih pengetahuan kewarganegaraan belum sepenuhnya berorientasi pada pembentukan karakter warga negara Indonesia (Mughtar, 2017b). Pendidikan Kewarganegaraan dibutuhkan dalam era reformasi dan demokrasi sekarang ini untuk membentuk warga negara yang cerdas, berkeadaban, dan bertanggung jawab bagi kelangsungan negara Indonesia (Winarno, 2015). Mata kuliah Kewarganegaraan berdasarkan Petunjuk Pelatihan Dosen Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Kewarganegaraan 2005 memuat materi:

1. Filsafat Pancasila
2. Identitas Nasional
3. Hak dan Kewajiban Warga Negara
4. Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi
5. Hak Asasi Manusia
6. Rule of Law atau Negara Hukum
7. Geopolitik Indonesia atau Wawasan Nusantara
8. Geostrategi Indonesia atau Ketahanan Nasional.

Materi tersebut diharapkan mampu mengemban misi sebagai pendidikan nilai kepribadian, pendidikan yang membekali mahasiswa dengan pemahaman tentang hubungan antara warga negara dengan negara, pendidikan mengenai demokrasi, dan pendidikan bela negara (Winarno, 2015). Dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan memiliki tugas membentuk karakter anti korupsi dengan menyisipkan gagasan-gagasan anti korupsi di setiap topik yang disajikan. Pembelajaran yang kreatif dengan memperhatikan psikologi mahasiswa akan banyak berpengaruh kepada perkembangan pemikiran mahasiswa bagaimana menghadapi situasi bangsa dan negara yang saat ini masih berperang melawan tindak pidana korupsi.

Perguruan tinggi bisa memberikan pesan khusus kepada setiap pengampu mata kuliah Kewarganegaraan untuk membuat kegiatan terkait dengan Tridharma

perguruan tinggi baik dalam tugas kepada mahasiswa untuk terlibat dalam penelitian yang terkait dengan Pendidikan Anti Korupsi maupun pengabdian masyarakat yang dalam kegiatan tersebut mahasiswa bisa merasakan bagaimana situasi dan kondisi di lapangan sehingga memiliki visi untuk mencegah tindak pidana korupsi di masa-masa yang akan datang. Pembelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan membutuhkan kesadaran yang mendalam bagaimana sejarah bangsa Indonesia selalu menunjukkan di tengah kelangkaan kepemimpinan berkarakter dan berwatak kerakyatan, selalu muncul pribadi-pribadi dengan tindakan politik tidak terduga, di sudut-sudut tanah air. Hal demikian bisa kita lihat dari zaman awal kemerdekaan hingga masa reformasi (Latif, 2014). Sri Sultan Hamengkubuwono X, Bung Hatta, Tri Rismaharini, Dedi Mulyadi, dan banyak tokoh lain, juga pribadi dosen pengampu mata kuliah tersebut menjadi bahan diskusi yang akan menguatkan karakter mahasiswa sebagai calon pemimpin masa depan.

PENUTUP

Implementasi spiritualitas Pancasila melalui Pendidikan Kewarganegaraan untuk membentuk karakter anti korupsi di jenjang perguruan tinggi dibebankan paling tidak kepada mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Secara ideal baik mata kuliah pengembangan kepribadian yang lain serta mata kuliah – mata kuliah di luar mata kuliah pengembangan kepribadian diharapkan memberikan kontribusi yang seimbang. Perguruan tinggi yang mendapatkan kewajiban melaksanakan Tridharma perlu mensinergikan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk mengimplementasikan spiritualitas Pancasila dalam mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan untuk membentuk karakter anti korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Feriyansyah. (2013). *Korupsi dalam Bidang Pendidikan*. Retrieved from https://www.kompasiana.com/feriansyach/korupsi-dalam-bidang-pendidikan_551f8670a33311253bb66120
- Kaelan. (2010). *Pendidikan Pancasila* (9th ed.). Yogyakarta: Paradigma Press.

- Latif, Y. (2012). *Negara Paripurna* (4th ed.). Jakarta: Gramedia.
- Latif, Y. (2014). *Mata Air Keteladanan*. (Y. Ibrahim, Idi Subandi, Iriantara, Ed.) (1st ed.). Jakarta: Mizan.
- Muchtar, S. Al. (2017a). *Ilmu Kewarganegaraan* (1th ed.). Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia.
- Muchtar, S. Al. (2017b). *Pendidikan Kewarganegaraan* (1st ed.). Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia.
- Noor, F. (2009). *Berpikir seperti Nabi*. (M. Jamaluddin, Ed.) (1st ed.). Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.
- Winarno. (2015). *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan* (3rd ed.). Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno. (2016). *Paradigma Baru Pendidikan Pancasila*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wiyono, S. (2015). *Reaktualisasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara* (VII). Malang: Universitas Wisnuwardhana Malang Press.